



JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

ISSN : 2302 - 9595
Volume 2 No 3 September 2013

JEP

**EDISI KHUSUS
DIES NATALIS UNILA**

*Analysis of State Securities Indonesian Government
(Periode 2000-2010)*
Dedy Yulawan

Determinants Of Human Development In Lampung Province
Prayudha Ananta

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Sebagai
Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah
Di Provinsi Lampung
Atin Susanti

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Di Indonesia Tahun 1992 - 2011 (Kajian Dari Sisi Fiskal)
Andre Avatara

Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah
Terhadap Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Di Indonesia
Amalia Febriani, Nairobi, Tiara Nirmala

Studi Komparatif Antara Kesehatan Perbankan Syariah Dengan
Perbankan Konvensional Sebelum Krisis (2007), Saat Krisis (2008),
Dan Pasca Krisis (2009) Di Indonesia
Lintang Puspita Ramadani, Heru Wahyudi



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNILA**

Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila
Jl. Soemantri Brojonegoro No 1 Gedongmeneng
Bandar Lampung 35145

Atin Susanti

*Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah
Di Provinsi Lampung*

**Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah
Di Provinsi Lampung**

Atin Susanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
Jalan Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
Email: synchestergold@gmail.com

ABSTRACT

Economic development undertaken by the government so far enough to encourage an increase in income areas, but in many cases can prevent problems relative inequality or disparitas. In general inequality cause spatial disparities or inequalities that led to the forward areas and disadvantaged areas as well as sectoral imbalances that created the flagship and non-flagship sector. The results showed the level of inequality in Lampung province is located in the low category with an index inequality between 0.22 to 0.26. Meanwhile, the results of the analysis show that there are regions lagging districts into three categories, namely, Tanggamus, Lampung Timur, and Way Kanan. And Overlay Analysis showed that the leading sector in Tanggamus are agricultural sector and mining and quarrying sector, in Lampung Timur is a sector of trade, hotels and restaurants and in Way Kanan the leading sector are agriculture, sectors industry and processing, carting sector and transportation and services sector.

Keywords: Income Disparity, economic potential, underdeveloped areas, Index Williamson, Typology Klassen, Location Quotient, shift share, MRP and Overlay

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah sumberdaya ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen (Sukirno, 1985).

Proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah merupakan suatu proses pembangunan yang menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan nasional dilakukan untuk menunjang dan mendorong berkembangnya pembangunan daerah, dan di lain pihak pembangunan daerah ditingkatkan untuk memperkokoh pembangunan nasional dan struktur perekonomian secara nasional yang mantap dan dinamis (Adisasmita, 2013).

Pembangunan daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Pembangunan ekonomi daerah mempunyai suatu tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Pembangunan ekonomi daerah tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) wilayah tersebut yang dicapai setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Arsyad (2010) memandang pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan output tanpa melihat apakah pertumbuhan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri ditandai dengan adanya laju kenaikan produk perkapita yang tinggi, sehingga untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah.

Salah satu cara yang digunakan untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Melalui data PDRB, dapat diketahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan peranan masing-masing sektor ekonomi yang menyokong perekonomian suatu daerah. Selain itu, berdasarkan data ini pula pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang terkait dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, karena dalam data ini memperlihatkan sektor-sektor ekonomi apa

saja yang dapat diprioritaskan pembangunannya untuk dijadikan sebagai sektor unggulan.

Perumusan kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing daerah. Namun pada kenyataannya, hasil pembangunan saat ini masih belum dapat dirasakan secara merata dan masih terdapat kesenjangan antardaerah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik dan keragaman yang tinggi antarwilayah. Perbedaan dan keragaman yang meliputi sumberdaya alam, potensi ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, kualitas sumber daya manusia, potensi geografis, kelengkapan sarana dan prasarana serta faktor-faktor penunjang lainnya berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan daerah tersebut.

Dilatarbelakangi akan permasalahan ini, semakin banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kesenjangan pendapatan antar daerah yang di terjadi di wilayah Indonesia, khususnya untuk melihat daerah-daerah mana saja yang dikategorikan rendah tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya.

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung tenggara pulau Sumatera juga tidak lepas dari permasalahan disparitas pendapatan ini. Penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2010 berjumlah 7.608.405 jiwa dan dengan total pendapatan regional 38.305.277 milyar rupiah. Dengan pendapatan per kapita pada tahun 2010 sebesar 5.034.600 rupiah.

Salah satu misi Provinsi Lampung adalah membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdaya saing, namun sekali lagi masalah disparitas tetap menjadi permasalahan klasik yang dihadapi provinsi ini. Hal ini dapat diidentifikasi melalui jumlah pendapatan regional dari masing-masing kabupaten/kota yang ada (Tabel 1). Dibawah ini disajikan data perkembangan PDRB provinsi Lampung berdasarkan kabupaten atau kota pada tahun 2006-2010.

Tabel 1 PDRB Atas Harga Konstan Menurut Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2006 – 2010 (Juta Rupiah)

KAB/KOTA	2006	2007	2008	2009	2010
Lampung Barat	1.214.618	1.286.066	1.351.526	1.427.754	1.509.674
Tanggamus	-	-	-	2.218.851	2.329.522
Lampung Selatan	3.492.899	3.721.149	3.908.442	4.114.980	4.348.906
Lampung Timur	3.591.362	3.751.659	3.947.097	4.119.786	4.330.053
Lampung Tengah	4.948.566	5.255.606	5.553.010	5.883.047	6.228.793
Lampung Utara	2.686.696	2.855.121	3.017.663	3.208.506	3.401.717
Way Kanan	1.156.013	1.219.881	1.275.967	1.340.230	1.405.680
Tulang Bawang	-	-	-	2.129.602	2.261.365
Pesawaran	1.336.858	1.415.474	1.491.042	1.572.794	1.661.428
Pringsewu	-	-	-	1.358.634	1.436.188
Tulang Bawang Barat	-	-	-	1.064.633	1.127.310
Mesuji	-	-	-	1.180.841	1.250.841
Bandar Lampung	5.079.047	5.426.158	5.802.308	6.151.069	6.540.521
Metro	451.254	479.408	504.393	531.202	562.509
Provinsi	30.861.360	32.694.890	34.443.152	36.221.139	38.305.277

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung

Sedangkan dari latar belakang yang dikemukakan tersebut diatas, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui tingkat ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Lampung dan daerah-daerah mana saja yang ada di Provinsi Lampung ini yang masuk ke dalam daerah tertinggal serta mengidentifikasi sektor apa yang bisa dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana tingkat ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di provinsi Lampung ? Bagaimana posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan perubahan pendapatan perkapitanya ? Sektor ekonomi apa saja yang termasuk sektor ekonomi unggul dan sektor ekonomi potensial di daerah yang relatif tertinggal sehingga dapat dirumuskan prioritas pengembangannya. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui tingkat ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Lampung, untuk mengetahui posisi perekonomian masing-masing kabupaten ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan perubahan pendapatan perkapitanya, untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggul dan sektor ekonomi

potensial di daerah yang relatif tertinggal sehingga dapat diprioritaskan pembangunannya untuk menurunkan kesenjangan ekonomi antar daerah

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (1999), menjelaskan istilah pembangunan ekonomi daerah, yaitu suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk nota kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang berkembang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak ekonomi yang diterapkan berbeda pula. Jika akan membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan.

Sementara itu menurut Arsyad (1999), strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu :

- 1) Strategi pengembangan fisik/lokalisasi (*locality or physical development strategy*)
- 2) Strategi pengembangan dunia usaha (*bussiness development strategy*)
- 3) Strategi pengembangan sumber daya manusia (*human resource development strategy*)
- 4) Strategi pengembangan masyarakat (*community based development strategy*)

Strategi pengembangan fisik/lokal ini ditujukan untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki basis pesona (*amenity bases*) atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik daerah/kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Sedangkan strategi pengembangan daerah antara lain

melalui penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dengan pengaturan dan kebijakan yang memberi kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.

Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia ini antara lain dapat dilakukan dengan pelatihan dengan sistem *customized training* atau pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemberi kerja. Sementara itu strategi pengembangan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu disuatu daerah.

Kegiatan tersebut juga sering disebut dengan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau memperoleh keuntungan usahanya.

Dalam kaitannya dalam mempercepat pengembangan ekonomi daerah atau regional, keterkaitan antar daerah merupakan hal yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan konsep spesialisasi. Adanya spesialisasi komoditas sesuai dengan sektor dan subsektor yang dimiliki memungkinkan dilakukannya kegiatan sektoral pada masing-masing daerah yang akan mempercepat pembangunan daerah.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Asumsi bahwa perekonomian suatu bangsa sebagai perekonomian tertutup yang acap kali digunakan dalam analisis pertumbuhan daerah. Terdapat dua pendekatan metodologis yang sangat berbeda, berkaitan dengan analisis pertumbuhan regional, mengadaptasi model - model ekonomi makro yang digunakan dalam teori pertumbuhan agregatif atau menafsirkan pertumbuhan suatu daerah menurut dinamikanya struktur industri.

Pendekatan pertama memungkinkan suatu daerah mengidentifikasi hubungan terpenting antara perpindahan faktor-faktor dan pertumbuhan regional dengan cara yang lebih jelas.

Sementara pendekatan kedua lebih berorientasi pada perubahan pola pertumbuhan regional sebagai efek neto dari keputusan-keputusan lokasi dan output yang diambil oleh perubahan-perubahan bisnis sebagai reaksi terhadap

perubahan-perubahan kebutuhan input dan pasar dalam industri-industri tersebut dan arus faktor adalah variabel-variabel yang relevan dalam keputusan seperti itu (Richardson, 2001).

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2004).

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik *space* terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional (Tarigan, 2004) :

- 1) Keuntungan Lokasi
- 2) Aglomerasi Migrasi
- 3) Arus lalu lintas modal antar wilayah.

Teori yang membicarakan pertumbuhan regional ini dimulai dari teori yang dikutip dari ekonomi makro atau ekonomi pembangunan dengan mengubah batas wilayah yang disesuaikan dengan lingkungan operasionalnya, dilanjutkan dengan teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi regional.

3. Ketimpangan Pendapatan Regional

Adanya perbedaan kemajuan antar daerah di jelaskan Myrdal dalam teorinya, Myrdal berpendapat pembangunan ekonomi proses sebab dan penyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan yang semakin banyak dan mereka yang tinggal di belakang akan menjadi semakin terhambat.

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Jhingan, 2012).

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan daerah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah (Jinghan, 2012) antara lain :

- 1) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah.
- 2) Alokasi investasi. Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain bahwa kurangnya investasi disuatu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
- 3) Tingkat mobilitas dan faktor-faktor produksi yang rendah antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional.
- 4) Perbedaan sumberdaya alam antar daerah. Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumberdaya alamnya akan lebih cepat maju dibandingkan dengan daerah yang miskin sumberdaya alam.
- 5) Perbedaan kondisi demografis antar wilayah. Ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan penawaran.
- 6) Kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur-unsur yang turut menciptakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Ketidaklancaran tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi.

Indikator yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan antar wilayah, diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Kontribusi Sektoral terhadap PDRB, Tingkat Kemiskinan dan Struktur Fiskal. Dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antarwilayah yang satu dengan

wilayah yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah.

Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa PDRB tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung atas harga konstan tahun 2006-2010, PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga konstan pada tahun yang sama dan data jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan kabupaten/kota. Data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan sumber lainnya.

Metode Analisis Data

Indeks Williamson

Salah satu indikator yang biasa dan dianggap cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah adalah indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan Williamson (1965).

Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang) untuk mengukur tingkat pendapatan perkapita suatu negara pada waktu tertentu (Arsyad, 2010).

Berikut ini adalah formulasi dari indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan oleh Williamson :

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}}$$

Keterangan :

- V_w = Indeks Williamson
- f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- i (jiwa)
- n = Jumlah penduduk Lampung (jiwa)
- Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota ke- i (Rupiah)
- Y = PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rupiah)

Kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Ketimpangan taraf rendah, bila indeks ketimpangan kurang dari 0,35
- b. Ketimpangan taraf sedang, bila indeks ketimpangan antara 0,35 – 0,50
- c. Ketimpangan taraf tinggi, bila indeks ketimpangan lebih dari 0,50

Analisis Tipologi Klassen

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota berdasarkan Tipologi Klassen dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah tipe I cepat-maju dan cepat-tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Lampung.
- 2) Daerah tipe II maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung.
- 3) Daerah tipe III berkembang cepat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung.
- 4) Daerah tipe IV relatif tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung.

Analisis Location Quotient (LQ)

Rumus menghitung LQ adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{x_i/PDRBi}{X_i/PDRBI}$$

Dimana :

x_i = nilai tambah sektor i di wilayah yang lebih sempit

$PDRBi$ = Produk Domestik Regional Bruto wilayah yang lebih sempit

X_i = nilai tambah sektor i secara Provinsi atau Nasional

$PDRBI$ = Produk Domestik Regional Bruto secara Provinsi atau Nasional

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.
- 2) Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.

- 3) Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan.

Analisis *Shift-Share*

Arsyad (2010) menjelaskan pada dasarnya analisis *shift-share* menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan membandingkannya dengan kinerja sektor-sektor wilayah yang lebih besar (provinsi/nasional).

Bentuk umum dari persamaan *shift-share* adalah sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + PP + PPW \dots \dots \dots (1)$$

$$N_{ij} = E_{ij} \times R_a \dots \dots \dots (2)$$

$$PP = (R_i - R_a) \times E_{ij} \dots \dots \dots (3)$$

$$PPW = (r_i - R_a) \times E_{ij} \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

D_{ij} = perubahan suatu variabel regional sektor (i) di kabupaten dalam kurun waktu tertentu.

N_{ij} = pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terhadap perekonomian kabupaten/kota.

PP = pertumbuhan proporsional atau pengaruh bauran industri

PPW = pertumbuhan pangsa wilayah

E_{ij} = PDRB sektor (i) kabupaten pada awal tahun periode

Analisis Model Rasio Pertumbuhan

Dalam penelitian ini, komponen MRP yang digunakan hanya rasio pertumbuhan wilayah (RPs). Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Wilayah Kabupaten (RPs)} = \frac{\Delta Y_{ij} / Y_{ij}(t)}{\Delta Y_j / Y_j(t)}$$

Keterangan :

$\Delta Y_{ij} = Y_{ij}(t+1) - Y_{ij}(t)$ adalah perubahan PDRB Kabupaten di sektor i

$Y_{ij}(t) =$ PDRB Kabupaten di sektor i tahun awal periode penelitian.

$\Delta Y_j = Y_j(t+1) - Y_j(t)$ perubahan PDRB Kabupaten.

$Y_j(t) =$ PDRB Kabupaten pada tahun awal periode penelitian.

Analisis Overlay

Metode ini digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan beberapa alat analisis. Dengan metode ini dapat diperoleh gambaran mengenai sektor-sektor unggulan dengan jalan memberikan penilaian

sektor-sektor ekonomi yang dilihat dari nilai positif (+) dan nilai negatif (-). Sektor-sektor yang mempunyai jumlah nilai positif (+) paling banyak berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan jika nilai suatu sektor mempunyai nilai negatif paling banyak atau tidak mempunyai nilai positif sama sekali berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Lampung

Pendapatan merupakan masalah klasik yang tidak pernah bisa dilepaskan dari perekonomian negara-negara berkembang. Indikator yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan antar wilayah, diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Kontribusi Sektoral terhadap PDRB, Tingkat Kemiskinan dan Struktur Fiskal. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson terhadap perekonomian di Provinsi Lampung didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Indeks Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2006-2010

Tahun	Indeks Williamson
2006	0.20
2007	0.20
2008	0.26
2009	0.22
2010	0.22

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Pada kurun waktu penelitian yaitu 2006-2010 nilai Indeks Williamson yang diperoleh adalah berkisar antara 0,20-0,23 ini berarti bahwa nilai ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2006-2010 tergolong rendah. Hal ini menunjukkan jika pendapatan antar kabupaten/kota masih terdistribusi secara merata selama periode penelitian.

Analisa Pola Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Berdasarkan Tipologi Klassen

Berdasarkan perhitungan terhadap pola perekonomian Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Sepuluh daerah lainnya masuk dalam klasifikasi daerah berkembang

cepat, masing-masing Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang dan Kota Metro. Tiga daerah lainnya masuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Way Kanan.

Sementara itu, dari keempat klasifikasi tersebut di atas tidak ada satupun kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori maju tapi tertekan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak satupun kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung.

Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Tertinggal.

1. Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan perhitungan analisis Location Quotient yang terdapat pada Lampiran *tabel L1* sektor basis di Kabupaten Tanggamus adalah sektor pertanian dengan indeks LQ sebesar 1,55. Hal ini menunjukkan bahwa ada nilai surplus sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus.

Sedangkan menurut perhitungan analisis *shift-share* diperoleh hasil bahwa sektor yang memiliki nilai pergeseran bersih terbesar adalah sektor pertanian dengan nilai Rp 329.529,52.

Berdasarkan analisis MRP pada Lampiran *tabel L3* diperoleh hasil bahwa tidak ada satupun sektor di kabupaten Tanggamus yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi.

2. Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan perhitungan analisis Location Quotient yang terdapat pada Lampiran *tabel L1* sektor basis di Kabupaten Lampung Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata 5,44 kemudian diikuti sektor pertanian sebesar 1,18 dan terakhir adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata sebesar 1,11. Indeks LQ sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki rata-rata 5,44 dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata 1,11.

Sedangkan menurut perhitungan analisis *shift-share* pada lampiran *Tabel L2* diperoleh hasil bahwa sektor yang memiliki nilai pergeseran bersih terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Berdasarkan analisis MRP pada Lampiran *tabel L3* diperoleh hasil bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama ditingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor-sektor yang bisa menjadi prioritas pemerintah daerah untuk dikembangkan.

3. Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan perhitungan analisis Location Quotient yang terdapat pada Lampiran *tabel L1* sektor basis di Kabupaten Way Kanan adalah sektor pertanian dengan indeks LQ sebesar 1,47. Hal ini menunjukkan bahwa ada nilai surplus sektor pertanian di Kabupaten Way Kanan.

Sedangkan menurut perhitungan analisis *shift-share* diperoleh hasil bahwa sektor yang memiliki nilai pergeseran bersih terbesar adalah sektor industri pengolahan.

Berdasarkan analisis MRP pada Lampiran *tabel L3* diperoleh hasil bahwa sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dibanding di tingkat provinsi.

Hasil Analisis Overlay tiga Kabupaten Tertinggal

Berdasarkan perhitungan terhadap ketiga alat analisis yang digunakan, yaitu analisis Location Quotient (LQ), Analisis Shift-share yang dalam hal ini diwakili oleh nilai pergeseran bersih, dan analisis Model Rasio MRP maka diperoleh analisis Overlay berikut ini :

Tabel 3. Hasil Analisis Overlay dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Sektor	Kab. Tanggamus			Kab. Lampung Timur			Kab. Way Kanan		
	L Q	PB	RP S	L Q	P B	RP S	L Q	P B	RP S
Pertanian	(+)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(+)	(-)	(+)
Pertambangan dan Penggalian	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)
Industri Pengolahan	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)
Listrik, Gas dan Air Bersih	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)
Bangunan	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)
Perdagangan, Hotel dan Restoran	(-)	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)
Pengangkutan dan Komunikasi	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)
Keuangan, Persewaan dan Js. Prsh	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)
Jasa-Jasa	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)

Sumber: BPS data diolah

Berdasarkan tabel analisis overlay tersebut sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Tanggamus dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Sektor dengan nilai 2+ adalah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa
- b. Sektor dengan nilai 1+ adalah sektor sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor gas, listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Untuk Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Sektor dengan nilai 3+ adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.
- b. Sektor dengan nilai 2+ adalah sektor pertanian, dan sektor pertambangan dan penggalian.
- c. Sektor dengan nilai 1+ adalah sektor bangunan.
- d. Sektor tanpa nilai + adalah sektor industri pengolahan, sektor gas, listrik dan air bersih, sektor pengangkutan

Untuk Kabupaten Way Kanan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Sektor dengan nilai 2+ adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa.
- b. Sektor dengan nilai 1+ adalah sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Kesimpulan

Strategi pengembangan dan pembangunan daerah tertinggal sebagai salah satu upaya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan harus berupaya mengutamakan pembangunan pada sektor-sektor potensial agar anggaran yang sudah tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap masing-masing kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung, diperoleh hasil bahwa tiap-tiap kabupaten memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda. Namun, hampir semua kabupaten menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor utama penunjang perekonomian walaupun sudah mulai bergeser ke sektor-sektor yang lain, seperti sektor jasa, industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta:Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dumairy, M. A. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Erawati, Ni Komang dan I Nyoman Mahendra. 2011. *Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayati, A. Roziana. 2008. *Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Kecamatan di Kabupaten Gresik*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*.Yogyakarta: Erlangga.
- Oktafilia, Shanty. 2011. *Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang.

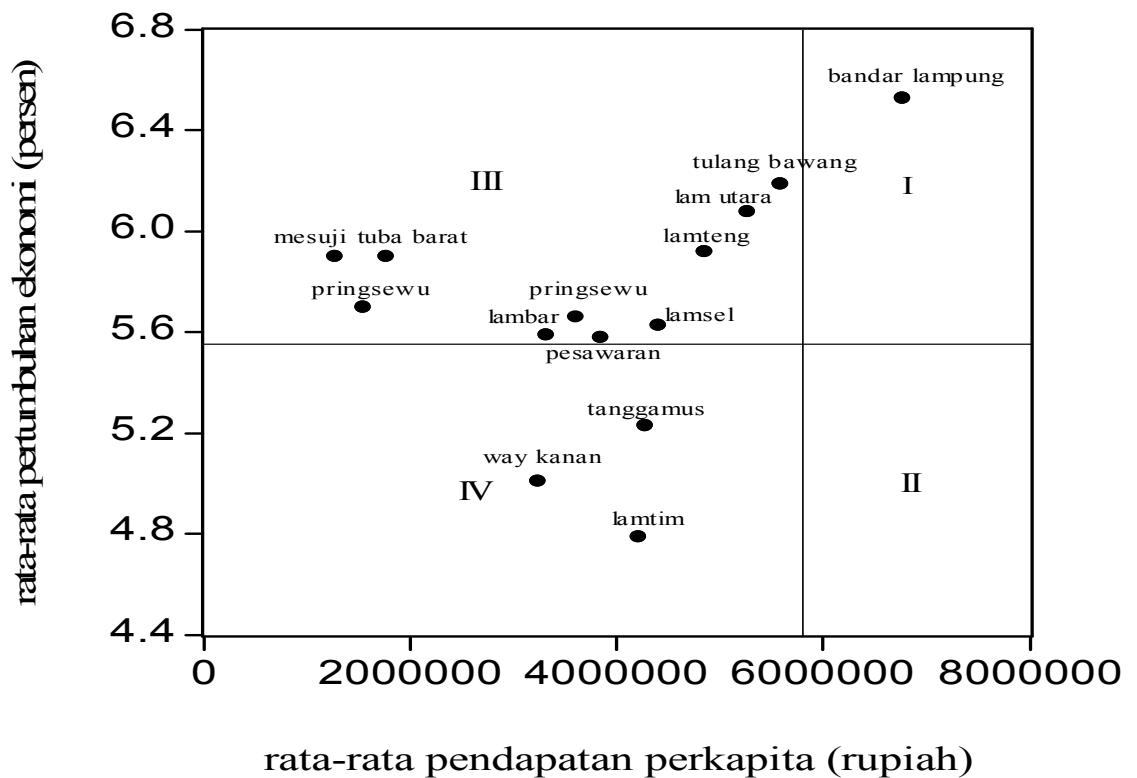
- Purba, F. Elvis. 2009. *Sektor Unggulan Dan Potensil Enam Kabupaten Pantai Timur Sumatera Utara*. Laporan Hasil Penelitian, Medan: Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Puspandika, Berry Agung. 2007. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah: Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rahmawati, Farida. 2006. *Analisa Kinerja Sektor Perekonomian Jawa Timur (Studi Perencanaan Regional: Model Kebijakan Prioritas Sektor)*. Jurnal Keuangan dan Perbankan.
- Restiatun, 2009. *Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Richardson, H. W. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutrisno, Adi. 2012. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010*. Jurnal Analisis Ekonomi Pembangunan.
- Tarigan, Robinson, 2004. *Ekonomi Regional*, Medan: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. 1999. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jilid 1, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Lampiran

Tabel L1 Rata-rata nilai LQ tiga Kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung Tahun 2006-2010

SEKTOR	Kabupaten Tanggamus		Kabupaten Lampung Timur		Kabupaten Way Kanan	
Pertanian	1,55	(+)	1,18	(+)	1,47	(+)
Pertambangan dan Penggalian	0,89	(-)	5,44	(+)	0,31	(-)
Industri Pengolahan	0,27	(-)	0,52	(-)	0,28	(-)
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,35	(-)	0,51	(-)	0,12	(-)
Bangunan	0,87	(-)	0,94	(-)	0,32	(-)
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,95	(-)	1,11	(+)	0,15	(-)
Pengangkutan dan Komunikasi	0,39	(-)	0,42	(-)	0,16	(-)
Keuangan, Persewaan dan Js. Prsh	0,49	(-)	0,42	(-)	0,11	(-)
Jasa-Jasa	0,94	(-)	0,55	(-)	0,35	(-)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (data diolah)



Tabel L2 Nilai Pergeseran Bersih tiga Kabupaten Tertinggal Provinsi Lampung Tahun 2006-2010

SEKTOR	Kabupaten Tanggamus		Kabupaten Lampung Timur		Kabupaten Way Kanan	
Pertanian	329.529,52	(+)	-231.264,90	(-)	-63.083,34	(-)
Pertambangan dan Penggalian	9.191,29	(+)	-310.183,81	(-)	-568,41	(-)
Industri Pengolahan	19.051,83	(+)	-99.025,19	(-)	33.319,27	(+)
Listrik, Gas dan Air Bersih	682,68	(+)	-1.639,62	(-)	62,24	(+)
Bangunan	22.315,12	(+)	-60.307,53	(-)	-1.604,94	(-)
Perdagangan, Hotel dan Restoran	79.370,20	(+)	1.936,83	(+)	-26.236,41	(-)
Pengangkutan dan Komunikasi	14.070,94	(+)	-5.112,47	(-)	10.406,87	(+)
Keuangan, Persewaan dan Js. Prsh	23.376,94	(+)	-31.135,39	(-)	4.162,05	(+)
Jasa-Jasa	37.505,14	(+)	-54.528,64	(-)	14.373,64	(+)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (data diolah)

Tabel L3 Rata-rata nilai RPS tiga Kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung Tahun 2006-2010

SEKTOR	Kabupaten Tanggamus		Kabupaten Lampung Timur		Kabupaten Way Kanan	
Pertanian	0,38	(-)	2,17	(+)	1,28	(+)
Pertambangan dan Penggalian	-0,23	(-)	1,14	(+)	-1,35	(-)
Industri Pengolahan	0,22	(-)	0,99	(-)	1,95	(+)
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,14	(-)	0,87	(-)	0,84	(-)
Bangunan	0,15	(-)	1,00	(+)	1,06	(+)
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,23	(-)	1,33	(+)	-0,10	(-)
Pengangkutan dan Komunikasi	0,20	(-)	0,94	(-)	1,09	(+)
Keuangan, Persewaan dan Js. Prsh	0,10	(-)	0,23	(-)	0,43	(-)
Jasa-Jasa	0,17	(-)	0,96	(-)	1,79	(+)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (data diolah)